

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.¹ Perlindungan hak warga binaan perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karenanya dalam kegiatan perlindungan warga binaan yang demikian merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi manusia. Salah satu bentuk perlindungan hak kepada warga binaan adalah pada saat warga binaan menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, adalah hak memperoleh kesehatan yang layak. Teori pemidanaan menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya.²

Pemidanaan terhadap seseorang yang telah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, semata-mata mempunyai tujuan untuk memberi efek jera terhadap pelaku. Oleh karena itu, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang efektif untuk menanggulangi masalah kejahatan.³ Warga binaan dalam menjalani masa pemidanaanya di Lembaga Pemasyarakatan berhak mendapatkan hak-haknya. Selanjutnya hak-hak warga binaan diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ,sebagi berikut :

¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 105.

² Jan Remeling, *Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 471.

³ Dwidja Priyanto, *Op. Cit.* Hlm. 2.

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi;
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam hak-hak warga binaan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu terkait hak warga binaan memperoleh kesehatan yang layak.

Hak – hak warga binaan tidak hanya diatur dalam undang – undang nasional. Pada tataran internasional juga diatur pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 25 Ayat (1) yang menyatakan:⁴

“bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk **kesehatan** dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan **perawatan kesehatan** serta pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat mengganggur, sakit, cacat, yang berada diluar kekuasannya.”

Oleh karena itu, warga binaan sebagai manusia juga memiliki hak atas kesehatan sebagaimana dijamin Pasal 25 Ayat 1 (DUHAM) tersebut.

⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, hlm. 335.

Warga Binaan berhak mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang layak dalam menjalani pembedaan karena status kemanusiannya. Selanjutnya pengertian dari Hak Asasi Manusia yang diatur di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi, dan di lindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Demikian Hak Asasi Manusia adalah segenap hak-hak yang dimiliki manusia karena terlahir sebagai manusia. Oleh karena itu, keberadaan hak asasi manusia bukan karena ditentukan oleh hukum positif suatu Negara akan tetapi karena status kemanusiannya.⁵ Jadi, Hak Asasi Manusia tidak membedakan setiap manusia, tidak terkecuali narapidana yang sedang menjalani pembedaan untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terkait hak memperoleh kesehatan yang layak bagi warga binaan yang menjalani pembedaan di Pemasyarakatan. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 5 ,mengatur mengenai asas-asas sistem pembinaan pemasyarakatan, sebagai berikut :

- a. “pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan;

⁵ Satyo Arinto, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Jadi, dalam pelaksanaan hak layanan kesehatan yang layak menurut penulis diperlukan asas persamaan perlakuan, persamaan pelayanan dan asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Oleh karena itu, hak pelayanan kesehatan yang layak wajib diberikan terhadap warga binaan yang menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemberian pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan wajib dilaksanakan secara preventif yaitu terkait pencegahan dalam pemberian sarana dan prasarana yang layak, mengadakan sosialisasi terkait pentingnya pencegahan penyakit demi berlangsungnya kehidupan yang baik. Sedangkan untuk upaya treatment yaitu dengan melakukan pengobatan untuk penyembuhan penyakit sehingga dapat sembuh semaksimal mungkin.

Berdasarkan Sistem Database Direktorat Jendral Pemasyarakatan terkait jumlah tahanan yang menghuni Lapas atau Rutan di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 3.228 (tiga ribu dua ratus dua puluh delapan). Selanjutnya untuk jumlah tahanan di Rutan Kelas II B Kudus dari Tahun 2016-2019 akan diuraikan dalam tabel dibawah ini, sebagai berikut:⁶

⁶ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, diakses 22 Januari 2019.

Tabel 1.1
Jumlah Tahanan di Rumah Tahanan Kelas II B Kudus
Tahun 2016-2017

No.	Tahun	Jumlah Tahanan
1.	2016	195
2.	2017	178
3.	2018	205
4.	2019	209
Jumlah Kapasitas		104 Orang

Sumber data: Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus.

Selanjutnya jumlah tahanan di Rutan kelas II B Kudus mengalami peningkatan tiap tahun. Jadi, dengan melihat jumlah kapasitas yang mampu ditampung Rutan Kelas II B Kudus sebanyak 104 orang, sedangkan untuk jumlah tahanan di Rutan Kelas II B Kudus saat ini sebanyak 209 orang. Maka berdampak pada pelayanan kesehatan kurang optimal.

Menurut penulis pra survey lapangan yang dilakukan oleh penulis, bahwa layanan kesehatan yang diberikan di Rutan kelas II B Kudus tidak maksimal. Hal ini dikarenakan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, sehingga satu sel di huni 15 orang berdampak narapidana berdesakan dalam ruangan yang kecil serta terbatasnya dalam penggunaan air. Menurut Eko Budihartanto penyakit yang paling banyak dikeluhkan yaitu hipertensi (pusing, sulit bernapas, nyeri di dada) dan *scabies* (gatal-gatal). Apalagi

ditambah dengan kebiasaan narapidana merokok di dalam sel yang menyebabkan sirkulasi udara bersih menjadi tidak optimal.⁷

Selanjutnya berikut akan diuraikan data mengenai warga binaan yang menderita penyakit scabies (gatal-gatal) dan hipertensi (pusing, sulit bernapas, nyeri di dada) di Rutan Kelas II B Kudus, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Tahanan di Rumah Tahanan Kelas II B Kudus
Menderita Hipertensi dan Scabies

No.	Penyakit	Jumlah
1.	Scabies (gatal-gatal)	20
2.	Hipertensi (pusing, sulit bernapas, nyeri di dada)	15

Sumber data: Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kudus.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa banyaknya jumlah warga binaan yang menderita penyakit scabies (gatal-gatal) dan hipertensi (pusing, sulit bernapas, nyeri di dada). Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian pada penyakit hipertensi dan scabies karena perlu upaya treatment untuk pengobatan terhadap penyembuhan penyakit sehingga dapat sembuh semaksimal mungkin. Hal ini dikarenakan penyakit hipertensi dan scabies merupakan penyakit yang sering dikeluhkan oleh warga binaan dan dalam penanganan tidak optimal, sehingga menyebabkan warga binaan dalam menjalani pemidanaan hak pelayanan kesehatan tidak memperoleh kesehatan yang layak dan ditambah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rutan dalam waktu 1 (satu) minggu terdapat pelayanan kesehatan yaitu

⁷ Eko Budihartanto, “Wawancara Pribadi”, Kepala Subsidi Pelayanan Tahanan, 10 Desember 2018, Rumah Tahanan Negara Kelas II B, Kudus.

pada hari rabu. Sehingga menurut penulis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Rutan Kelas II B Kudus tidak optimal.

Bedasarkan urain latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk mengambil Penulisan hukum yang berjudul “**PERLINDUNGAN HAK WARGA BINAAN UNTUK MEMPEROLEH KESEHATAN YANG LAYAK**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hak pelayanan kesehatan terhadap warga binaan di Rutan Kelas II B Kudus ?
2. Bagaimana upaya-upaya untuk mengoptimalkan hak pelayanan kesehatan terhadap warga binaan yang menderita hipertensi dan scabies untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi hak pelayanan kesehatan terhadap warga binaan di Rutan Kelas II B Kudus.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengoptimalkan hak pelayanan kesehatan terhadap warga binaan yang menderita hipertensi dan scabies untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat ataupun kegunaan yang dapat diambil dan diterapkan. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan khasanah keilmuan hukum masyarakat, khususnya perlindungan hak narapidana untuk memperoleh kesehatan yang layak, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum masyarakat di Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat secara praktis, yaitu kepada :

- a. Masyarakat, memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai hak pelayanan kesehatan yang layak bagi narapidana yang menjalani pidana.
- b. Instansi terkait dan praktisi hukum, sebagai bahan masukan kepada pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Mahasiswa Hukum, sebagai bahan pemikiran dan menambah khasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya bagi hukum pidana.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V.

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari pengertian hukum pidana dan ppidanaan, warga binaan, pelayanan kesehatan dan perlindungan hak kesehatan warga binaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang akan dipaparkan yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV : Menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis mengurai dan membahas tentang kajian penelitian implementasi hak pelayanan kesehatan terhadap warga binaan di Rutan Kelas II B Kudus dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan hak pelayanan kesehatan terhadap warga binaan yang menderita hipertensi dan scabies untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Hasil penelitian lapangan selanjutnya diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka

teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II, sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.

